



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5603-5608

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kebijakan Kesiapan Pemda Kabupaten Mappi Papua Selatan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Viccarlo Zwart Wuisan¹, Amir Jaya², Yunus Sirante³, Giovani Zeist Lambe⁴

^{1,2,3} Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

⁴ Changsha Medical University, Changsha, Hunan, China, 410219

wuisancarlo@gmail.com, amirjaya0505@gmail.com, yunusbappeda@gmail.com, zeistlambe11@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan pemda Kab. Mappi Papua Selatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan pendekatan kualitatif dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebagai obyek penting yang memegang peranan fundamental bagi Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan APBD berdasarkan kondisi efisiensi untuk memenuhi tujuan Prioritas Nasional yaitu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025 daerah wajib menyesuaikan APBD yang didalamnya bergejolak antara Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah yang keduanya tidak dapat berjalan bersamaan karena kondisi umum wilayah Kabupaten Mappi yang lokasi-lokasi sekolahnya hanya dapat dicapai melalui angkutan sungai sementara APBD yang sebagian besar merupakan transferan Pemerintah Pusat memotong anggaran infrastruktur secara merata bagi seluruh daerah, sehingga berdampak pada pembangunan manusia itu sendiri khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Hasil penelitian ini menunjukkan Kab. Mappi belum siap secara anggaran untuk memenuhi seluruh mandatory pemerintah pusat dengan keadaan masih menggantungkan hidupnya pada pendapatn transfer untuk menyediakan sarana-prasarana yang menunjang Makan Bergizi Gratis, walaupun angka pasrtisipasi sekolah meningkat dalam empat tahun terakhir namun diperlukan perhatian khusus bagi daerah atau wilayah yang susah untuk dijangkau.

Kata kunci: Kebijakan Kesiapan, Kabupaten Mappi, Program Makan Bergizi Gratis

1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : Perencanaan keuangan daerah; Pelaksanaan keuangan daerah; Pengelolaan aset daerah; Pembinaan dan pengendalian; Pelaporan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menetapkan obyek penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana penelitian ini berfokus pada Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2025. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu menghadapi berbagai permasalahan, termasuk keterlambatan penetapan, ketiidaksesuaian dengan perencanaan daerah, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Selain itu tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia berkualitas, transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan daerah dalam mengelola keuangan modern juga menjadi kendala.

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah Bagaimana kesiapan Pemda dalam Anggaran APBD untuk program MBG ?, Bagaimana kesiapan Pemda dalam Sarana dan Prasarana untuk program MBG ?. Bagaimana kesiapan Pemda dalam Sumber Daya Manusia untuk program MBG ?.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan terhadap sasaran peserta didik dan non peserta didik (sesuai Perpres 83 Tahun 2024) dalam rangka mendukung terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045. Petunjuk teknis dan operasional program makan bergizi gratis ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan program makan bergizi gratis.

2. Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah sebuah jenis metode yang berfokus untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial dari perpektif orang-orang yang terlibat didalamnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengenahui dampak program makan bergizi gratis terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Mappi. Lokasi penelitian mengacu pada lingkungan kerja nyata yang menjadi tempat pengumpulan data untuk penelitian. Lingkungan inilah yang menjadi tempat peneliti untuk mengamati, berinteraksi, atau mengumpulkan informasi dari pelaku atau subjek penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun pada penelitian ini, Lokasi penelitiannya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi.[1]

2.1. Design dan Teknis Analisis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

a). Data Primer

1. Wawancara

- 1.1 Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengenai Implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang diawali dengan dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 2025
- 1.2 Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai Kondisi Fiskal daerah dan kewajiban untuk melaksanakan program makan bergizi gratis
- 1.3 Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah mengenai dikeluarkannya PMK No. 29 Tahun 2025
- 1.4 Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kelola mengenai pengaruh pelasaan program makan bergizi gratis pada Organisasi Perangkat Daerah

2. Observasi Langsung

- 2.1 Pengamatan terhadap proses manajerial yang dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2 Observasi terhadap rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Tim TAPD
- 2.3 Pengamatan terhadap aktivitas Penyusunan APBD yang dilakukan oleh BPKAD
- 2.4 Observasi terhadap interaksi Tim TAPD dengan seluruh stakeholder penyusunan APBD

b). Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

1. Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD
2. Dokumen Penyusunan Perubahan APBD
3. Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses sistematis untuk mencari, mengolah dan menafsirkan data yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan dan dokumen. Tujuan dari Analisis data adalah untuk mengekstrak informasi penting, pola dan pemahaman lebih dalam dari data, yang memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, menarik kesimpulan, dan berkontribusi dalam bidang pengetahuan yang mereka tangani. Beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu :

a). Mengumpulkan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya(triangularisasi)

b). Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan ke hal yang penting. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c). Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

d). Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

2.3. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi sebelum dikelurakannya Inpres dan KMK. Setelahnya Pemerintah Kabupaten Mappi harus menyesuaikan angka efisiensi dalam APBD Kabupaten Mappi dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Efisiensi APBD Kabupaten Mappi

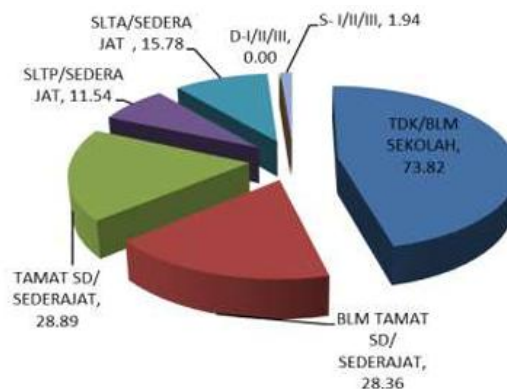
Sumber Dana			Efisiensi		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Sesudah	
DAU	DAU yang ditentukan penggunaannya	Bidang Pekerjaan Umum	Rp. 99.905.224.000	0	(Rp. 99.905.224.000)
Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur	Dana Otsus	Penerimaan Umum	Rp. 97.338.607.000	Rp. 93.922.304.000	(Rp. 3.416.303.000)
		Penerimaan berbasis kinerja	Rp. 101.867.951.000	Rp. 106.976.808.000	(Rp. 3.891.143.000)
DAK Fisik	Jalan	Layanan Dasar	Rp. 36.258.610.000	0	(Rp. 36.258.610.000)
Total Efisiensi Pendapatan Transfer					(Rp.143.471.280.000)

2.4. Presentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sementara dari segi kualitas pendidikan masih sangat rendah di Kabupaten Mappi, hal ini dilihat dari presentase penduduk yang menamatkan pendidikan mereka melalui ijazah tertinggi disetiap individu. [2]

Kecukupan pendidikan di Kabupaten Mappi dari segi kuantitatif masih belum memenuhi standar apabila dibandingkan dengan jumlah murid, terlebih lagi dengan penduduk usia sekolah. Meskipun adanya penurunan pada rasio murid terhadap guru maupun rasio murid terhadap sekolah namun rasio tersebut masih tinggi baik dipendidikan dasar maupun Pendidikan menengah pertama. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah :

1. Terbatasnya persebaran fasilitas Pendidikan yang disebabkan karena kondisi geografis Kabupaten Mappi. Lokasi-lokasi sekolah hanya dapat dicapai melalui angkutan sungai sementara fasilitas angkutan tersebut sangat terbatas sehingga masyarakat mendapat kesulitan dalam mejangkau fasilitas Pendidikan.
2. Jumlah tenaga pendidik belum tersebar merata
3. Rendahnya kesadaran anak usia sekolah terhadap Pendidikan. Hal ini terjadi karena orang tua siswa masih acuh terhadap Pendidikan anak-anaknya.



Gambar 1. Arsitektur Pencerminan Database

2.5. Pergeseran Anggaran MBG

Pergeseran anggaran salah satu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah pergeseran anggaran adalah lingkup perubahan APBD, namun dalam pelaksanaannya pergeseran anggaran dapat dilakukan sejak awal pelaksanaan APBD hingga setelah perubahan APBD. [3]

Pergeseran anggaran salah satu alasan dilakukan perubahan APBD. Selain pergeseran anggaran, alasan merubah APBD, yakni : (a). perkembangan tak sesuai asumsi KUA (kebijakan umum anggaran). (b). keadaan menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. (c). keadaan darurat. (d). keadaan luar biasa. [4]

Kebijakan yang disediakan pemerintah untuk digunakan pemda-pemda, namun menggunakannya harus butuh pendalaman dalam memaknainya sehingga dapat berkesesuaian dengan kaidah dan regulasi pergeseran anggaran. Kadang kala pemda kebablasan dan sembarangan menggunakan kebijakan pergeseran anggaran sehingga cepat dalam melakukan pergeseran tanpa melihat kaidah dan regulasi pergeseran anggaran. Hal ini memperburuk tajamnya penggunaan pergeseran anggaran karena tidak ada pengendalian dan pengawasan (tidak ada evaluasi berjenjang dan tidak ada sanksi administrasi serta sanksi lainnya). [5]

3. Hasil dan Diskusi

Efisiensi belanja menjadi momok bagi Pemerintah Daerah untuk bergerak dan bekerja guna pemenuhan program/kegiatan dan kinerja hingga mempersempit ruang gerak Aparatur Sipil Negara untuk berkreasi dan berinovasi. Efisiensi Belanja menjadi sorotan public kala Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan kegiatan dianggap pemborosan seperti bimtek, diklat, perjalanan dinas dan lain-lain. Padahal efisiensi tak harus dimaknai 'tidak ada sama sekali tapi dimaknai 'dikurangi dan dibatasi', artinya bimtek, diklat, perjalanan dinas dan lainnya tetap ada. Bagi Pemerintah Daerah hasil efisiensi belanja sesuatu yang baik, jika dimaknai guna menormalkan ruang fiscal daerah dan memperbaiki serta meluruskan tata Kelola keuangan daerah yang 'chaos' hingga amburadul.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan motivasi belajar siswa di Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang signifikan, program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. [6]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis kepada siswa, dengan fokus pada peningkatan kesehatan dan motivasi belajar. Data menunjukkan bahwa 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar, yang berdampak negatif pada konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan asupan gizi siswa, mengurangi angka stunting dan masalah gizi buruk dikalangan anak-anak, serta meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Sasaran penerima manfaat ini meliputi anak-anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi local melalui pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) serta produksi pangan lokal. [7]

3.1. Kesiapan Pemda dalam Anggaran APBD

Berdasarkan KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 Kabupaten Mappi mengalami pemotongan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.143.471.280.000 seperti terlihat pada Tabel Efisiensi APBD Kabupaten Mappi. Namun dalam mendukung Program MBG yang menjadi Prioritas Pemerintah Pusat, Kabupaten Mappi mendapat penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik berdasarkan KMK 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.20.378.939.000 untuk mendukung terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis. [8]

Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran sehingga harus melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, bersamaan dengan telah dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada 21 februari 2025 maka program kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 perlu menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru.

3.2. Kesiapan Pemda untuk Sarana dan Prasarana MBG

Kondisi geografis Kabupaten Mappi Sebagian besar terdiri dari daratan rendah dan berawa. Rawa-rawa permanen ditutupi oleh hutan sagu. Profil topografis Kabupaten Mappi hanya menunjukkan satu level ketinggian yaitu antara 0,0m – 100,0m dari permukaan laut (mdpl). Struktur tanah yang terdapat di Kabupaten Mappi menunjukkan potensi yang cukup besar untuk pengembangan kegiatan pertanian dan Perkebunan.

Pemanfaatan tanah di Kabupaten Mappi tercatat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tanaman pangan antara lain untuk tanaman padi sawah 378,248 ha (di distrik Obaa, Edera, Yakomi, dan Bamgi) dengan hasil produksi padi sebesar 616,5 ton. Untuk tanaman sayuran diproduksi 35 ton yang tersebar di beberapa distrik karena proses penanaman yang tidak merata disemua distrik. Sedangkan komoditas tanaman buah-buahan yang ada yakni mangga dan durian dengan hasil produksi beragam mencapai 123 ton. Kelapa diproduksi sebanyak 775,01 ton. Hampir Sebagian hutan mappi ditumbuhi pohon sagu yang luasnya ±818,178 Ha.

Kabupaten mappi juga memiliki daerah tangkapan air, yaitu air tanah menengah dalam dan daerah tanpa air tanah. Bagian wilayah dengan air tanah menengah dalam kabupaten mappi mencapai 2.264.074. Ha atau sekita 98,8% wilayah kabupaten mappi memiliki potensi air tanah. [9,10]

3.3. Kesiapan Pemda dalam Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Mappi pada tahun 2023 tercatat 110.290 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk berkurang sekitar 851 jiwa atau berkurang sekitar -0,77% dari tahun 2022 tercatat 111.141 jiwa, kondisi tersebut menunjukkan periode tahun 2022-2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2019-2020 sekitar 1,61% pertahun atau bertambah rata-rata sebanyak 1.750 jiwa pertahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk ditahun 2021, disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran dan migrasi penduduk akibat Covid 19. Navisya, Daffa (2024) *Analisis Pengaturan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.* [11,12]

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu cara untuk melaksanakan Pembangunan Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (meneluruh disemua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Saputri RA, Asyahri Y, El Wafa F.(2023) *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).* Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Siregar, Nurmayana (2022) *Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai.* [13,14]

Potret keberhasilan Pembangunan Manusia akan menjadi indikator yang potensial dalam melihat hasil Pembangunan manusia yang sudah dilakukan lewat program Makan Bergizi Gratis yang akan dilakukan kedepannya. Nur F.(2024) *Analisis komparatif kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).* [15]

4. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai Analisis Kesiapan Pemda Mappi Papua Selatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, maka disimpulkan Solusi dan Pengembangannya sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran yang dikelola Pemda Mappi belum mampu memenuhi semua kebutuhan dasar belanja daerah untuk selaras dengan Prioritas Nasional khususnya Program Makan Bergizi Gratis sehingga lebih efektif dan efisien jika APBD memprioritaskan peningkatan program kegiatan yang menunjang dalam peningkatan UMKM sehingga memperoleh keuntungan dari hasil daerah sendiri termasuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sarana dan prasarana di Kabupaten Mappi belum mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah sehingga target dari Program Makan Bergizi Gratis akan terbatas pada wilayah tertentu dan belum bisa dimaksimalkan untuk memenuhi target tersebut oleh sebab itu infrastruktur juga merupakan fokus utama yang wajib dipenuhi sehingga setiap indikator pembangunan pemerintah daerah dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

sumber daya manusia Kabupaten Mappi sudah meningkat sejak 4 tahun terakhir dengan adanya infrastruktur jaringan komunikasi sehingga perlahan masyarakatnya mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Referensi

1. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kombinasi (mixed methods)*. CV Alfabeta.
2. Agustin, W. T. (2019). *Peran Guru dalam Mengenalkan Makanan Bergizi seimbang pada Anak kelompok B3 di TK Kartika IV-73 Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2018/2019*.
3. Kemenkeu. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Suhasil-Program-Makan-Bergizi-Gratis>
4. Kemenko PMK. (2025). *Menilik Eksistensi Makan Bergizi Gratis (MBG)*. <https://kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tinjau-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis-di-sekolah-luar-biasa-slb-bc-cahaya-jaya>
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304633/permendagri-no-15-tahun-2024>
6. Eureka Media Aksara. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto Menuju Ondonesia Emas 2045*.
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang *Badan Gizi Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
8. BAPPENAS. (2024). *"Rencana Implementasi Program Makan Bergizi Gratis"*
9. BAPPEDA Kab. Mappi. (2025). *"RKPD Kabupaten Mappi TA 2025"*
10. BPKAD Kab. Mappi. (2025). *"APBD Kab. Mappi Tahun Anggaran 2025"*.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang *Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/kmk-29-tahun-2025>
12. Navisya, Daffa (2024) *Analisis Pengaturan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
13. Saputri RA, Asyahri Y, El Wafa F. (2023) *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar*.
14. Siregar, Nurmayana (2022) *Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
15. Nur F. (2024). *Analisis komparatif kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)*.
16. K. Lambe, N. Patiung, and I. F. Latiep, "THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS," *Account. Prof. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 60–71, 2025, [Online]. Available: <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168>
17. R. M. Mangopo, X. I. S. Landjang, K. H. P. Lambe, and A. Jaya, "Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 8, no. 1, pp. 171–180, 2025, doi: 10.36778/jesya.v8i1.1887.